

KH Idham Chalid's Political Thoughts on Islam and National Problems

Sulaiman Kurdi¹, Ichwan Ahnaz Alamudi²

¹ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia.
sulaimankurdi123@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia.
ichwanahnazalamudi19@gmail.com

Received: 27-03-2024; Accepted: 14-06-2024; Published: 30-06-2024;

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh corak keislaman di Indonesia yang bermacam-macam dapat dikategorikan ke dalam Islam kanan, Islam kiri, dan Islam tengah. KH Idham Chalid menahkodai Nahdlatul Ulama selama 6 periode sudah menyatu dengan corak Islam tengah atau Islam moderat yang menjadi mayoritas paham keagamaan di Indonesia. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pemikiran politik KH Idham Chalid terkait keislaman sampai dengan problematika kebangsaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berjenis kesejarahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga paradigma tentang keislaman dan kebangsaan atau agama dan negara diantaranya, paradigma integratif, paradigma simbiotik dan paradigma sekuleritas. Selanjutnya, KH Idham Chalid sebagai sosok yang menarik tentang pemikiran syuranya dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam berpolitik, sebagai figur yang dikenal sangat luwes dan moderat di dalam mengambil setiap keputusan. Maka, ketika terjadi perbedaan pandangan atau perspektif melihat dari pemikiran KH Idham Chalid tidak bisa terlepas dari pemikiran syuronya atau musyawarah.

Kata Kunci: Pemikiran; Politik; Keislaman; Kebangsaan.

Abstract

This research is motivated by the various Islamic styles in Indonesia that can be categorized into right Islam, left Islam, and middle Islam. KH Idham Chalid has led Nahdlatul Ulama for 6 periods and has merged with the style of central Islam or moderate Islam which is the majority of religious understanding in Indonesia. Researchers want to know how KH Idham Chalid's political thought is related to Islam to the problems of nationality. This research is a qualitative research of historical type. This research shows that there are at least three

paradigms regarding Islam and nationality or religion and the state, including the integrative paradigm, the symbiotic paradigm and the secular paradigm. Furthermore, KH Idham Chalid as an interesting figure about his shura thought and has his own characteristics in politics, as a figure known to be very flexible and moderate in making every decision. So, when there are differences in views or perspectives on KH Idham Chalid's thinking, it cannot be separated from his shura thinking or deliberation.

Keywords: *Thought; Politics; Islamicity; Nationality.*

Introduction

Indonesia merupakan negara yang berpaham kebangsaan (*Nation-State*), dan bukan negara yang berpaham teokratis berdasar pada ideologi agama tertentu. Karena, hampir seluruh paham agama besar di dunia hidup serta berkembang di Indonesia. Walaupun, umat Islam sendiri memiliki populasi atau sebagai representasi mayoritas sekitar 87% secara nasional,¹ sikap tasamuh mereka terhadap agama lain di negeri ini sangat terlihat menonjol. Hal tersebut, tidak saja dibuktikan dengan tolerannya hubungan antar agama yang dibangun selama ini, melainkan sikap juga yang diperlihatkan oleh para pemimpin muslim saat dilakukannya perumusan dasar konstitusi dengan tidak mencantumkan simbol formal Islam dalam dasar negara.

Telaah sejarah secara holistik membawa umat kepada wawasan yang lebih filosofis terkait dinamika relasi agama dan politik di Indonesia. Penyusunan konstitusi negara dan setelah berjalan mengalami perkembangan pada akhirnya memperlihatkan dinamika konflik yang tidak saja memunculkan benih segregasi politik dan sosial di dalam umat, tetapi juga memberi ancaman terkait dengan eksistensi suatu negara. Diterimanya Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar negara yang notabene menggantikan piagam Jakarta saat itu hanya bisa dijelaskan sebagai sebuah kontrak politik, berkat kewibawaan mereka para pemimpin muslim moderat.²

¹Zuhri Humaidi, "Dialektika Islam Politik Dan Nasionalisme: Analisis Restrospektif," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 2 (22 April 2018): 889, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries>.

²Humaidi, 890.

Hubungan agama dan negara pada dinamika politik modern tidak selalu memperlihatkan relasi yang harmoni.³ Hal tersebut dikarenakan pengelihatian terhadap agama dan negara sebagai entitas yang tidak hanya berbeda, melainkan sesuatu yang tidak bisa dipertemukan, juga keduanya dalam pusaran preferensi yang mengalami ketegangan dengan eskalasi yang kian memanas. Komarudin Hidayat⁴ mengatakan bahwa dalam sejarah, relasi agama dan negara selalu memunculkan perdebatan, ini terjadi karena agama dan negara mempunyai tekanan masing-masing secara komposisi berbeda.

Fenomena munculnya kegaduhan antara agama dan negara di Indonesia terlihat dalam ruang publik yang dalam dimensi politik dengan adanya nomenklatur politik identitas. Kehadiran politik identitas di Indonesia merupakan suatu hal yang berbeda, jika dibandingkan dengan negara lain seperti politik identitas di Amerika. Dalam negara Indonesia politik identitas dewasa ini begitu identik menyangkut persoalan agama, etnis dan ideologi politik, sedangkan di Amerika ada suatu kelompok sosial yang eksistensinya merasa tersingkir oleh mayoritas arus besar, seperti gerakan feminisme, gerakan kulit hitam yang esensinya memperjuangkan sebuah kesetaraan dan kesamaan.⁵

Corak keislaman di Indonesia bermacam-macam, yang dapat dikategorikan ke dalam Islam kanan, Islam kiri, dan Islam tengah. Islam tengah atau disebut Islam moderat merupakan mayoritas paham keagamaan di Indonesia. Hal ini ada sejak proses masuknya Islam yang dibawa para walisongo, dan dewasa ini corak keislaman itu selanjutnya diakomodasi oleh organisasi besar bidang sosial kemasyarakatan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri pada tahun 1926 oleh KH. Hasyim Asyari.⁶ Sehingga, Islam yang moderat memang sudah menjadi karakteristik dari Nahdlatul Ulama.⁷

³M. Asrul Pattimahu, "Agama dan Masa Depan Kebangsaan Indonesia," *DIALEKTIKA* 13, no. 1 (30 Juni 2020): 96, <https://doi.org/10.33477/dj.v13i1.1362>.

⁴Komaruddin Hidayat, *Agama untuk Peradaban, Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), 210.

⁵Pattimahu, "Agama dan Masa Depan Kebangsaan Indonesia," 97.

⁶Nur Hidayatullah, "Idham Chalid Di Nahdlatul Ulama," *Idrak: Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (1 Desember 2018): 1, <http://jurnal.stit-rh.ac.id/index.php/idrak/article/view/1>.

⁷Moh Ashif Fuadi, "Tradisi Pemikiran Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 21, no. 1 (1 September 2022): 17, <https://doi.org/10.24014/af.v21i1.16692>.

Salah satu ketua PBNU paling tersohor yang berasal dari tanah Banjar Kalimantan Selatan yaitu KH. Idham Chalid, menahkodai selama 6 (enam) periode (1956-1984) dan umurnya saat itu masih berusia sekitar 34 tahun. Beliau juga pernah dipercaya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah yang berada di Amuntai, Darul Qur'an Cisarua yang ada di Bogor dan Darul Ma'arif Cipete yang ada di Jakarta Selatan. Juga tidak kalah pentingnya kontribusinya di dunia International yaitu sebagai Presiden Organisasi Islam Asia Afrika.⁸

Perjalanan hidup dan kiprah beliau bersama Nahdlatul Ulama tentunya begitu besar, sehingga nama beliau sangat melekat dan terkenang hingga saat ini, akan tetapi sungguh disayangkan amat jarang nama beliau dikenal oleh orang banyak. Dalam tulisan ini akan menyuguhkan pemikiran politik beliau terkait keislaman sampai dengan problematika kebangsaan, penulis menganggap ini suatu hal yang amat menarik karena KH. Idham Chalid mempunyai ciri khas tersendiri dalam berpolitik. Beliau merupakan seorang sosok yang dikenal sangat luwes dan moderat di dalam mengambil setiap keputusan.⁹

Selanjutnya penelitian terdahulu dalam penelitian merupakan hal yang begitu penting untuk disampaikan. Hal tersebut dilakukan guna mempertegas posisi penelitian yang baru dengan penelitian yang sudah diteliti oleh para pengkaji sebelumnya. Untuk melihat orisinalitas dalam penelitian ini, dilakukan studi pustaka dan membandingkan dengan beberapa penelitian yang sudah ada sebagai perbandingan agar tidak terjadi kesamaan. Penelitian tentang tokoh Idham Chalid memang sudah diteliti, akan tetapi penelitian yang secara spesifik terkait kajian pemikiran politiknya hingga keislaman dan problem kebangsaan belum tersentuh oleh para peneliti lain. Penulis setidaknya menemukan beberapa tulisan mengenai tokoh Idham Chalid, yaitu diantaranya:

Pertama, Andri Nurjaman dkk menulis jurnal ilmiah berjudul "Tokoh Politik Islam Era Orde Lama Indonesia: Kajian Pemikiran KH Idham Chalid dalam

⁸Hidayatullah, "Idham Chalid Di Nahdlatul Ulama," 2.

⁹Khairul Tri Anjani Anjani, "Nahdlatul Ulama : Politik Kebangsaan Pada Masa Dr. Kh. Idham Chalid (1956-1984)," *Adz-Zikr : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (24 Desember 2021): 22–23, <https://doi.org/10.55307/adzzikr.v6i2.107>.

Menerima Konsep Demokrasi Terpimpin Tahun 1965”.¹⁰ Hasil penelitian ini adalah bahwa KH Idham Chalid menerima konsep demokrasi terpimpin karena masih sesuai dengan ajaran Islam yaitu musyawarah, selain dari itu Nahdlatul Ulama dalam politik dan demokrasi bersifat luwes dan akomodatif serta bekerjasama dengan penguasa. Sehingga berbeda apa yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu posisinya berfokus terkait dengan isu keislaman dengan problematika kebangsaan dengan menghubungkan pemikiran KH Idham Chalid.

Kedua, Andri Nurjaman dan Asep Sulaiman juga menulis jurnal ilmiah dengan judul “Peran KH Idham Chalid dalam Konferensi Islam Asia Afrika di Kota Bandung Tahun 1965”.¹¹ Penelitiannya menghasilkan bahwa peran KH Idham Chalid sangat banyak dan sampai ia terpilih menjadi ketua konferensi Islam Asia Afrika yang bertempat di Kota Bandung, saat kepemimpinannya itu ketika terjadi perdebatan yang panas antara kedua belah pihak kehadiran Idham Chalid mampu menyejukkan kembali forum dan para pihak dengan keputusannya dapat memuaskan kedua belah pihak yang semula panas tersebut. Sehingga, berangkat dari penelitian sebelumnya posisi peneliti sekarang akan melanjutkan terkait dengan pemikiran politik KH Idham Chalid yang belum ada tersentuh secara komprehensif melalui rekam jejak kepemimpinan beliau di bidang politik.

Method

Penelitian ini adalah penelitian yang metodenya menggunakan metode kualitatif. Dalam metode ini penulis melakukan pencarian sebuah data dan fakta yang sebenarnya, dengan berjeniskan sebuah penelitian pustaka yaitu sejarah. Tahapan terkait metode sejarah dalam penelitian ini meliputi tahapan heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretatif (penafsiran), dan historiografi (penulisan kisah sejarah).¹² Bahan

¹⁰Andri Nurjaman dkk., “Tokoh Politik Islam Era Orde Lama Indonesia: Kajian Pemikiran KH Idham Chalid Dalam Menerima Konsep Demokrasi Terpimpin Tahun 1965,” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 4, no. 1 (20 Juni 2022): 53–74, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v4i1.132>.

¹¹Andri Nurjaman, Asep Sulaiman, dan Agung Purnama, “Peran KH. Idham Chalid dalam Konferensi Islam Asia Afrika di Kota Bandung Tahun 1965,” *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 1 (22 September 2020): 147–76, <https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9193>.

¹²Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 43.

sejarah yang penulis butuhkan kemudian dikumpulkan berdasarkan bahan-bahan yang berhubungan dengan topik atau bahasan terkait penelitian.¹³

Findings and Discussion

Keislaman dan Kebangsaan

KH. Hasyim Asy'ari mempunyai pemikiran dan peranan yang cukup besar dalam berbagai hal, diantaranya di bidang keislaman dan kebangsaan. Mengenai pemikiran keislaman KH. Hasyim Asy'ari, ia mempunyai pemikiran keislaman yang bercorak pada Islam tradisional, diantara pemikiran keislaman KH. Hasyim Asy'ari adalah dalam bidang tasawuf (sufisme), bidang teologi, dan bidang fiqh. Sedangkan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari mengenai kebangsaan mengacu pada ide-ide politiknya yang dapat menyatukan umat Islam Indonesia untuk melawan Kolonialisme, seperti mendirikan Pesantren, Ormas NU, dan organisasi lainnya untuk wadah menjaga persatuan.

Pemikiran keislaman dan kebangsaan KH. Hasyim Asy'ari sampai saat ini patut diamalkan dan diteladani untuk kehidupan saat ini. Sebab dewasa ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin memisahkan antara keislaman dan kebangsaan yang dikhawatirkan dapat memicu pecah belahnya umat. Padahal masalah keislaman dan kebangsaan tidak serta merta dipertentangkan begitu saja, sehingga keduanya harus saling melengkapi demi kesejahteraan bangsa dan kenyamanan dalam menjalankan perintah agama.¹⁴

Dalam Islam, kajian fiqh siyasah atau siyasah al-syar'iyah atau al-ahkam al-shultaniyyah (hukum pemerintahan) membahas hubungan antara politik dan agama. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan muslim, setidaknya ada tiga paradigma yang berkembang mengenai keterkaitan antara agama dan negara dalam umat Islam.¹⁵

1. Paradigma Integratif: Paradigma ini menggambarkan adanya penyatuan antara Islam dan negara, di mana konsep hubungan antara agama dan negara dianggap

¹³Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 93.

¹⁴Muhammad Rijal Fadli dan Ajat Sudrajat, "KEISLAMAN DAN KEBANGSAAN: TELAAH PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (16 Juni 2020): 126, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3433>.

¹⁵Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)," *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 15, no. 2 (2014): 114–16, <https://www.neliti.com/publications/30636/>.

sebagai entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya dianggap sebagai lembaga yang bersatu, di mana negara berfungsi sebagai lembaga politik dan keagamaan sekaligus.

2. Paradigma Simbiotik: Paradigma ini menjelaskan bahwa hubungan antara agama dan negara dianggap sebagai saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama memerlukan negara sebagai instrumen untuk memelihara dan mengembangkan agama itu sendiri. sebaliknya, negara memanfaatkan agama dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas. Meskipun agama dan negara dianggap sebagai dua entitas berbeda, keduanya saling membutuhkan. Konstitusi dalam paradigma ini tidak hanya bersumber dari sosial kontrak, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh hukum, agama dan syariat.
3. Paradigma Sekuleritas: Paradigma ini mencirikan pemisahan antara agama dan negara. Agama dan negara dianggap sebagai dua entitas yang berbeda dan masing-masing memiliki yurisdiksi sendiri-sendiri. kedua entitas ini harus dipisahkan dan tidak diizinkan untuk saling campur tangan. Dalam pandangan ini, keberadaan agama dan negara harus dijaga agar tidak saling berinterferensi satu sama lain.

Biografi Singkat KH Idham Chalid

Idham Chalid merupakan anak pertama dari empat bersaudara yang lahir di daerah Setui, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Agustus 1921.¹⁶ Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir pada tanggal 5 Januari 1922.¹⁷ Idham Chalid masa-masa kecilnya di Amuntai, disamping menuntut ilmu agama dengan ayahnya juga menuntut ilmu di Sekolah Rakyat dan setelah selesai sekolah dasarnya tahun 1935, ia meneruskan pendidikan di Madrasah Al-Rasyidiyah dan selanjutnya Pondok Pesantren Modern Gontor merupakan tempat Idham Chalid menuntut Ilmu.¹⁸

Setelah menuntut ilmu di Gontor selama 5 tahun, Idham Chalid meneruskan pendidikannya di Jakarta. Kecerdasannya dalam bahasa Asing yaitu bahasa Jepang,

¹⁶Suryawan Abdan Alim, "Peran Politik Idham Chalid dalam Nahdlatul Ulama Tahun 1945-1984," *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 2019, 4.

¹⁷Alim, 4.

¹⁸Alim, 4.

Membuat Jepang mempunyai ketertarikan untuk menjadikan Idham Chalid sebagai penerjemah di dalam pertemuan alim ulama.¹⁹ Dari sinilah, ia akrab dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga pada akhirnya mengantarkannya menjadi sebuah sosok penting dalam sejarah eksistensi Nahdlatul Ulama.

Dalam bidang pendidikan, beliau pernah menjadi pengajar di tempat di mana dirinya menimba ilmu yaitu Pondok Pesantren Modern Gontor. Ketika kembali ke Amuntai Idham Chalid menahkodai Rasyidhiyah Khalidiyah dan mendirikan Ittihad Al –Ma’had al-Islamiyah. Bahkan juga ketika menahkodai Nahdlatul Ulama, ia mendirikan perguruan Islam Darul Ma’arif yang bertempat di Jakarta dan pendidikan Yatim Darul Qur’an.²⁰

Selain aktivitasnya sebagai seorang pendidik, Idham Chalid juga terjun ke dalam dunia politik. Sebelum diketahui sebagai Ketua Partai Masyumi Kalimantan Selatan, ia menjadi sekretaris Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) pada tahun 1946, satu tahun berikutnya bergabung dengan Sarekat Muslimin Indonesia (SERMI) dan selanjutnya bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK).²¹

Penting untuk diketahui, di bidang politik Idham Chalid pernah mempunyai jabatan sebagai wakil perdana menteri Kabinet Ali Sastromidjojo II, Kabinet Juanda, Menteri Utama bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Ampera I dan Ketua MPR.²² Idham Chalid pada tahun 1950 menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan dari Masyumi untuk wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan pemilu 1955.²³

Dewasa ini semenjak Nahdlatul Ulama berpisah diri dengan Masyumi dan mendirikan partai sendiri, Nahdlatul Ulama ikut serta pemilu pada tahun 1955. KH Idham Chalid saat itu bertugas sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu). Lapunu sendiri merupakan dewan khusus yang menangani

¹⁹Syamsul Rahmi, “MODERNISASI PESANTREN (Studi Peran KH. Idham Chalid di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Tahun 1945-1966 M),” *AL-RISALAH* 14, no. 1 (30 Juni 2018): 13, <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/38>.

²⁰Rahmi, 13–14.

²¹Ahmad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 36.

²²Rahmi, “MODERNISASI PESANTREN (Studi Peran KH. Idham Chalid di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Tahun 1945-1966 M),” 14.

²³Alim, “Peran Politik Idham Chalid dalam Nahdlatul Ulama Tahun 1945-1984,” 4.

persoalan pemilu bagi partai Nahdlatul Ulama yang dibentuk pada Mei 1953. Nahdlatul Ulama memberikan kesuksesan dalam pemilu 1955 dan bertengger diposisi empat besar dengan jumlah 45 kursi, dan tidak kalah penting juga keberhasilan Nahdlatul Ulama pada tahun 1956 mendapatkan lima kursi menteri pada masa kabinet Ali Sosroadmijoyo II.²⁴

Dalam muktamar Nahdlatul Ulama ke- 21 bertempat di Medan pada tahun 1956 KH Idham Chalid terpilih sebagai ketua umum PBNU. Ketika kabinet Ali Sasroadmijoyo II menyerahkan mandatnya kepada presiden pada tanggal 14 Maret 1957 dan kemudian dibentuknya kabinet Djuanda, KH Idham Chalid juga kembali terpilih saat itu sebagai Wakil Perdana Menteri, jabatan ini habis sampai berlakunya demokrasi terpimpin dengan dekrit presiden pada Juli 1959.²⁵ Saat demokrasi terpimpin ini KH Idham Chalid menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) sampai tahun 1960. Selanjutnya, KH Idham Chalid diangkat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).²⁶

Saat menahkodai Nahdlatul Ulama, KH Idham Chalid menghadapi dua konflik internal. Pertama, perebutan kursi pucuk pimpinan Nahdlatul Ulama dengan Subchan ZE. Kedua, perbedaan soal perspektif terkait masa depan organisasi dengan ulama sepuh Nahdlatul Ulama.²⁷ Kemudian, pergumulan antara KH Idham Chalid dan Subchan ZE mengalami situasi yang amat sengit untuk menacapkan pengaruh dan kekuasaan di dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama. Subchan membawa arah organisasi lebih modern, dinamis dan inklusif, tetapi mendapatkan banyak penolakan dari kalangan “sepuh” karena dianggap berbahaya untuk organisasi Nahdlatul Ulama.²⁸

Konflik kedua yang dialami KH Idham Chalid terkait dengan para sepuh-sepuh Nahdlatul Ulama. Berasal dari ketidaksenangan posisi mereka sebagai kekuatan di luar pemerintah terhadap pemerintah orde baru, mereka mulai vokal mengkritisi kepemimpinan politik Nahdlatul Ulama yang dinahkodai oleh KH

²⁴Nurjaman dkk., “Tokoh Politik Islam Era Orde Lama Indonesia,” 62–63.

²⁵Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*, 43–44.

²⁶Nurjaman dkk., “Tokoh Politik Islam Era Orde Lama Indonesia,” 63.

²⁷Alim, “Peran Politik Idham Chalid dalam Nahdlatul Ulama Tahun 1945-1984,” 5.

²⁸Alim, 5.

Idham Chalid. Puncaknya terjadi 2 Mei 1982, empat ulama Nahdlatul Ulama (As'ad Syamsul Arifin, Machrus Aly, Ali Makshum dan Masykur) berkunjung di kediaman Idham Chalid dan hasilnya muncul pembicaraan bahwa KH Idham Chalid mundur sebagai ketua umum Nahdlatul Ulama.²⁹

Berita mundurnya KH Idham Chalid terdengar pada tanggal 6 Mei itu dan ada jeda beberapa waktu KH Idham Chalid menarik kembali pernyataannya yang mengundurkan diri dari ketua umum Nahdlatul Ulama. Hal tersebut pada akhirnya membuat massa Nahdlatul Ulama bingung hingga terpecah, bahkan sampai dengan para pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama terbagi dua dan berlangsung selama tiga bulan kasus KH Idham Chalid belum juga tuntas, masing-masing mereka tetap pada pendiriannya. Para ulama tetap beranggapan bahwa KH Idham Chalid sudah tidak menduduki jabatannya sebagai ketua umum, akan tetapi para pendukungnya sebelumnya menilai dengan dicabutnya pernyataan pengundurannya masalah ini akan selesai.³⁰

KH Idham Chalid masih menahkodai Nahdlatul Ulama, terjadi rekonsiliasi antara kelompok As'ad Syamsul Arifin dengan kelompok pendukung KH Idham Chalid yang cetuskan oleh Ibu Wahid Hasyim yang bertempat di Surabaya. Akan tetapi, seyogyanya yang terjadi rekonsiliasi akhir antara kedua belah kelompok itu baru dicapai pada pergelaran Mukhtamar Nahdlatul Ulama di Yogyakarta pada tahun 1989.³¹

KH Idham Chalid disebut sebagai seorang tokoh tiga zaman diantaranya tokoh kemerdekaan, orde lama dan orde baru.³² Ia merupakan seorang ulama dan politikus muslim yang dimiliki oleh bangsa ini, hingga diberikan gelar Doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari perguruan tinggi luar negeri yaitu Universitas Al-Azhar Mesir pada tanggal 2 Maret 1957 dan tak kalah penting juga bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhono menobatkan KH Idham Chalid sebagai Pahlawan Nasional pada tanggal 7 Nopember 2011.³³

²⁹Alim, 5.

³⁰Alim, 5.

³¹Alim, 5.

³²Hidayatullah, "Idham Chalid Di Nahdlatul Ulama," 2.

³³Rahmi, "MODERNISASI PESANTREN (Studi Peran KH. Idham Chalid di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Tahun 1945-1966 M)," 14.

Perjalanan panjang KH Idham Chalid di organisasi Nahdlatul Ulama dan partai politik membuat ia terbawa ke dalam kancah nasional³⁴, hingga menduduki jabatan strategis dan penting di negeri ini. Namun, KH Idham Chalid memiliki penyakit yang dideritanya selama 10 tahun terakhir ini yang pada akhirnya menyebabkan tokoh nasional ini tutup usia pada tanggal 11 Juli 2010 dalam usianya 88 tahun.³⁵

Nahdlatul Ulama: Pemikiran Politik KH Idham Chalid tentang Keislaman dengan Problematika Kebangsaan

Organisasi masyarakat dan bangsa Indonesia tidak akan bisa dipisahkan dari kontribusi pemimpin-pemimpinnya dalam sejarah negara ini. Terbukti pasca kemerdekaan bangsa ini telah banyak prestasi-prestasi dan tentu membanggakan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan dan kemajuan bangsa, bahkan tidak heran sampai saat ini hubungan antara ormas Islam dengan bangsa Indonesia begitu intim dan tidak bisa dipisahkan dalam konteks sejarah keislaman dan kebangsaannya.³⁶

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang mempunyai mayoritas kultural, sebagian banyak dari perdesaan dan intelektual mayoritas pada pondok pesantren. Dalam pengelihatannya dikalangan orang banyak, Nahdlatul Ulama sering dilabeli sebagai organisasi sosial-keagamaan tradisional. Itulah makanya, kelompok Nahdlatul Ulama dikenali sebagai masyarakat tradisional. Meskipun tradisionalisme di satu sisi menjadi hambatan perkembangan Nahdlatul Ulama, akan tetapi dalam sisi lain tradisionalisme sekaligus amunisi sosial-intelektual dan power bagi Nahdlatul Ulama.³⁷

³⁴Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*, 31.

³⁵Nurjaman, Sulaiman, dan Purnama, "Peran KH. Idham Chalid dalam Konferensi Islam Asia Afrika di Kota Bandung Tahun 1965," 160.

³⁶ "Integrasi, Interkoneksi Keislaman, Kebangsaan Dan Nahdlatul Wathan Perspektif Historis Dari Nahdlatul Wathan Untuk Indonesia. NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan," 2, diakses 7 Januari 2024, <https://ejurnal.iainyasribungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/124>.

³⁷Mutawalli Mutawalli, "Pergulatan Pemikiran Melawan Arus: Penyempalan Dalam Tubuh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah," *Ulumuna* 11, no. 2 (2007): 238–39, <https://doi.org/10.20414/ujis.v11i2.401>.

Pesantren sebagai basis sosio-intelektual Nahdlatul Ulama mempunyai kekayaan intelektual klasik yang kemudian diwariskan ke generasi selanjutnya. Kekayaan intelektual itu menjadikan Nahdlatul Ulama sangat mengapresiasi terhadap pemikiran-pemikiran klasik meskipun ada kalangan sebageian mengklaim sebagai bid'ah. Tetapi, dari geneologi intelektual yang mayoritas pada pesantren, Nahdlatul Ulama justru bisa mengembangkan dan menyahuti khazanah intelektual dengan modernisasi. Proses dialektika itu menyebabkan intelektual muda Nahdlatul Ulama melirik pemikiran-pemikiran Islam modern yang pada gilirannya menjadi analisa kritis dalam merumuskan ide-ide cerdasnya di dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama.³⁸

Pemikiran Hasan Hanafi, pembaharuan hanyalah rekonstruksi penafsiran terhadap tradisi sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan kata lain, tradisi yaitu landasan sekaligus penghubung menuju pembaruan.³⁹ Setiap tradisi, selain menjadi landasan, ia juga harus memiliki jangkauan ke depan dalam upaya membangun tradisi baru yang berkelanjutan. Karena, setiap masa akan membangun tradisinya sendiri sesuai dengan keadaan dan melihat kebutuhan zaman.⁴⁰ Penegasan terkait pentingnya nilai-nilai tradisi yang telah ada sebagaimana mejadi referensi serta terus akan hidup dan dipelihara, tetapi tidak menutup mata dengan kebutuhan zaman untuk membentuk suatu tradisi baru.

Dalam berpolitik, Nahdlatul Ulama memiliki kecenderungan berpolitik kebangsaan, bukan hanya cara berpolitik yang orientasinya semata-mata kekuasaan. Nahdlatul dalam kebijakan politik kebangsaan sudah ada sejak lama saat masa penjajah Belanda. Dewasa ini politik kebangsaan yang dimaksud adalah cara berpolitik yang tujuannya untuk kepentingan umum atau kolektif, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu, karena Islam sebagai penuntun juga mengatur segala aspek kehidupan termasuk soal negara dan bangsa. Sehingga, Nahdlatul

³⁸Mutawalli, 239.

³⁹Muhamad Bindaniji dan Moh Ashif Fuadi, "Post-Tradisionalisme: Membincang Basis Epistemologi Dan Transformasi Gerakan Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24, no. 1 (30 April 2022): 68, <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.12909>.

⁴⁰Bindaniji dan Fuadi, 68.

Ulama menempatkan juga aspek keislaman di dalam kebangsaan sebagai sumber nilai dan kearifan, bukan sebagai alat yang orientasinya kepada politik praktis.⁴¹

Nahdlatul Ulama secara terang-terangan menyebut dirinya sebagai kelompok ulama penjaga terpeliharanya ajaran Islam Aswaja di Indonesia. Secara ringkas, Aswaja artinya penganut Sunnah Nabi dan para sahabatnya, dan dalam pergerakan politik Nahdlatul Ulama didasarkan pergerakannya itu berdasarkan kaidah-kaidah fikih Aswaja. Sementara itu, kaidah fikih yang menjadi pedoman NU, diantaranya menghindari terjadinya kerusakan terlebih dahulu dari pada mencari kebaikan, syarat untuk dapat melakukan kewajiban menjadi kewajiban itu sendiri, dan apa yang tidak mungkin terwujud seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya.⁴²

Dalam perspektif tokoh Nahdlatul Ulama lain seperti Abdurrahmad Wahid misalnya, Islam adalah agama universal tidak mengatur bentuk negara yang terkait dengan ruang dan waktu sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menyebut dirinya sebagai kepala negara Islam. Walaupun Nabi sudah melaksanakan revolusi pada masyarakat Arab, tetapi ia sangat menghormati budaya dan memperbaharui secara pelan-pelan sesuai dengan psikologi manusia karena orientasinya bukan untuk menciptakan orde baru, melainkan mendidik manusia guna tercapainya keselamatan hingga terwujudnya suatu kebebasan, keadilan dan kesejahteraan.⁴³

Islam Indonesia memiliki sifat tersendiri, ia berada di bawah pengaruh ulama dan kiai. Dewasa ini bedanya dengan para ulama-ulama di India dan Timur Tengah, diambil garis secara genaralnya bahwa ulama-ulama Indonesia lebih bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan situasi dan perkembangan keadaan. Sehingga, dalam hal ini pengaruh mereka para ulama dan kiai pada masyarakat menjadi tetap besar.⁴⁴

⁴¹Anjani, "Nahdlatul Ulama," 25.

⁴²Alim, "Peran Politik Idham Chalid dalam Nahdlatul Ulama Tahun 1945-1984," 5.

⁴³Mohammad Muslih, "Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem Kebangsaan," *Tsaqafah* 6, no. 1 (22 Juni 2010): 142, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/142/133>.

⁴⁴Ahmad Baso, "SATU ABAD NAHDLATUL ULAMA, SATU ABAD PENGHADIRAN WALI SONGO: MELACAK AKAR-AKAR PEMIKIRAN KEISLAMAN-KEBANGSAAN NAHDLATUL ULAMA," *MIMIKRI* 9, no. 1 (16 Juni 2023): 1, <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/1023>.

KH Idham Chalid sebagai sosok yang menarik tentang pemikiran syuranya dengan demokrasi terpimpin, ia dan Nahdlatul Ulama sepakat konsep demokrasi terpimpinnya Soekarno. Pemikiran KH Idham Chalid itu tertuang dalam majalah Api Islam tahun 1965 yang berjudul Haluan Politik Negara edisi nomor dua sampai dengan sembilan. Selain itu, pemikiran politik tentang konsep syura sebagai pijakan pemikiran Islam terkait demokrasi terpimpin disampaikan dalam suatu buku yang judulnya Islam dan Demokrasi Terpimpin, buku tersebut adalah naskah KH Idham Chalid sebagai diktat yang pernah dikuliahkan di Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama di Surakarta.⁴⁵

Ada alasan mengapa Nahdlatul Ulama ikut serta ke dalam demokrasi terpimpin yaitu kedekatan para tokoh Nahdlatul Ulama dengan Presiden Soekarno seperti KH Wahab Chasbullah dan KH Idham Chalid. Mereka berdua itu merupakan role model mutlak yang menentukan arah politik Nahdlatul Ulama. KH Wahab Chasbullah dari syuriah yang tugasnya mencari pembenaran agama dari sikap politik yang dipilih Nahdlatul Ulama, sementara itu KH Idham Chalid dari Tanfidziyah tugasnya sebagai pelaksana praktis dari sikap-sikap yang diambil syuriah.⁴⁶

Pemikiran politik KH Idham Chalid yang menjadi perhatian adalah menerima demokrasi terpimpinnya Presiden Soekarno melalui konsep syuro.⁴⁷ Pemikiran politik KH Idham Chalid tentang demokrasi terpimpin bisa disederhanakan dengan tiga poin penting, pertama, esensi demokrasi yaitu menghormati pendapat mereka kelompok minoritas, kedua, kebebasan menyampaikan pendapat atau keinginan penguasa untuk bermusyawarah, merupakan barometer dari demokrasi nasional, ketiga, konsultasi atau musyawarah yaitu sebagai ukuran minimal dari suatu demokrasi. Sehingga, pemikiran KH Idham Chalid tentang demokrasi tidak bisa dilepaskan dari kata musyawarah.⁴⁸

⁴⁵Nurjaman dkk., "Tokoh Politik Islam Era Orde Lama Indonesia," 63.

⁴⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Pergumulan Partai Politik Islam pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4, no. 1 (2020): 44.

⁴⁷Nurjaman, Sulaiman, dan Purnama, "Peran KH. Idham Chalid dalam Konferensi Islam Asia Afrika di Kota Bandung Tahun 1965," 160.

⁴⁸Nurjaman dkk., "Tokoh Politik Islam Era Orde Lama Indonesia," 64.

Menurut KH Idham Chalid dalam politik Nahdlatul Ulama yaitu berupaya menyelesaikan setiap persolan dengan mengedepankan hikmah kebijaksanaan musyawarah. Nahdlatul Ulama setiap ada persoalan berupaya mengatasinya dengan mencari jalan tengah, selama tidak bertolakbelakang terhadap ideologi dan keyakinan asasi dalam organisasi.⁴⁹ Selain itu, tugas primer seorang pemuka agama yaitu berdakwah, KH Idham Chalid memakai organisasi sebagai tempatnya berdakwah. Cita-cita tersebut coba diwujudkan melalui organisasi Nahdlatul Ulama terutama saat menjadi partai politik, karena cita-cita “Izul Islam wal Muslimin” menurutnya bisa ditempuh dengan perjuangan politik lewat partai.⁵⁰

Prestasi yang dimiliki oleh KH Idham Chalid begitu baik untuk politik Nahdlatul Ulama, ia merupakan pemimpin yang bisa mempertahankan kedudukannya dalam pemerintahan. Dalam kepemimpinannya KH Idham Chalid diketahui membuat puncaknya politik Nahdlatul Ulama karena banyak berkontribusi sejak pemilu tahun 1955 sampai masa orde baru. Ia mengungkapkan bahwa dalam masa demokrasi terpimpin yang menonjolkan musyawarah musfakat seirama dengan syura dalam Islam. KH Idham Chalid berpendapat antitesa yang terdapat dalam partai-partai politik sangat khas dengan masa parlementer tidak diajarkan dalam Islam. Puncaknya saat terjadinya perubahan pemerintahan masa itu Nahdlatul Ulama tetap bertahan karena KH Idham Chalid sangat dekat dengan Presiden Soeharto, akhirnya kondisi tersebut memperlihatkan ke publik bahwa negara Indonesia sejatinya tidak bisa dipisahkan dari peran Nahdlatul Ulama.⁵¹

Conclusion

Keislaman dan kebangsaan sampai saat ini patut diamalkan dan diteladani untuk kehidupan saat ini. Sebab dewasa ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin memisahkan antara keislaman dan kebangsaan yang dikhawatirkan dapat memicu pecah belahnya umat. Setidaknya ada tiga paradigma yang berkembang mengenai keterkaitan antara agama dan negara dalam umat Islam diantaranya, paradigma integratif, paradigma simbiotik dan paradigma sekuleritas. KH Idham

⁴⁹ Alim, “Peran Politik Idham Chalid dalam Nahdlatul Ulama Tahun 1945-1984,” 11.

⁵⁰ Alim, 11.

⁵¹ Anjani, “Nahdlatul Ulama,” 22.

Chalid sebagai sosok yang menarik tentang pemikiran syuranya dengan demokrasi terpimpin. Pemikiran politik KH Idham Chalid tentang demokrasi terpimpin yang berhubungan dengan keislaman dan kebangsaan bisa disederhanakan dengan tiga poin penting, pertama, esensi demokrasi yaitu menghormati pendapat mereka kelompok minoritas, kedua, kebebasan menyampaikan pendapat atau keinginan penguasa untuk bermusyawarah, ketiga, konsultasi atau musyawarah yaitu sebagai ukuran minimal dari suatu demokrasi. KH. Idham Chalid mempunyai ciri khas tersendiri dalam berpolitik, figur yang dikenal sangat luwes dan moderat di dalam mengambil setiap Keputusan.

BIBLIOGRAPHY

- Alim, Suryawan Abdan. "Peran Politik Idham Chalid dalam Nahdlatul Ulama Tahun 1945-1984." *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 2019, 4.
- Anjani, Khairul Tri Anjani. "Nahdlatul Ulama : Politik Kebangsaan Pada Masa Dr. Kh. Idham Chalid (1956-1984)." *Adz-Zikr : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (24 Desember 2021): 19–34. <https://doi.org/10.55307/adzzikr.v6i2.107>.
- Baso, Ahmad. "SATU ABAD NAHDLATUL ULAMA, SATU ABAD PENGHADIRAN WALI SONGO: MELACAK AKAR-AKAR PEMIKIRAN KEISLAMAN-KEBANGSAAN NAHDLATUL ULAMA." *MIMIKRI* 9, no. 1 (16 Juni 2023): 1–18. <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/1023>.
- Bindaniji, Muhamad, dan Moh Ashif Fuadi. "Post-Tradisionalisme: Membincang Basis Epistemologi Dan Transformasi Gerakan Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24, no. 1 (30 April 2022): 58–71. <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.12909>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Pergumulan Partai Politik Islam pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4, no. 1 (2020): 44.
- Fadli, Muhammad Rijal, dan Ajat Sudrajat. "KEISLAMAN DAN KEBANGSAAN: TELAAH PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (16 Juni 2020): 109–30. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3433>.

- Fuadi, Moh Ashif. "Tradisi Pemikiran Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 21, no. 1 (1 September 2022): 12–25. <https://doi.org/10.24014/af.v21i1.16692>.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)." *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 15, no. 2 (2014): 185–200. <https://www.neliti.com/publications/30636/>.
- Hidayat, Komaruddin. *Agama untuk Peradaban, Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.
- Hidayatullah, Nur. "Idham Chalid Di Nahdlatul Ulama." *Idrak: Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (1 Desember 2018): 1–18. <http://jurnal.stit-rh.ac.id/index.php/idrak/article/view/1>.
- Humaidi, Zuhri. "Dialektika Islam Politik Dan Nasionalisme: Analisis Restrospektif." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 2 (22 April 2018): 889–903. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries>.
- "Integrasi, Interkoneksi Keislaman, Kebangsaan Dan Nahdlatul Wathan □ Perspektif Historis Dari Nahdlatul Wathan Untuk Indonesia. NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan." Diakses 7 Januari 2024. <https://ejurnal.iaiyasribungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/124>.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Muhajir, Ahmad. *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muslih, Mohammad. "Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem Kebangsaan." *Tsaqafah* 6, no. 1 (22 Juni 2010): 129–46. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/142/13>.
- Mutawalli, Mutawalli. "Pergulatan Pemikiran Melawan Arus: Penyempalan Dalam Tubuh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah." *Ulumuna* 11, no. 2 (2007): 237–64. <https://doi.org/10.20414/ujis.v11i2.401>.
- Nurjaman, Andri, Arzam Arzam, Zufriani Zufriani, dan Doli Witro. "Tokoh Politik Islam Era Orde Lama Indonesia: Kajian Pemikiran KH Idham Chalid Dalam Menerima Konsep Demokrasi Terpimpin Tahun 1965." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 4, no. 1 (20 Juni 2022): 53–74. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v4i1.132>.
- Nurjaman, Andri, Asep Sulaiman, dan Agung Purnama. "Peran KH. Idham Chalid dalam Konferensi Islam Asia Afrika di Kota Bandung Tahun 1965."

Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah 4, no. 1 (22 September 2020): 147–76. <https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9193>.

Pattimahu, M. Asrul. “Agama dan Masa Depan Kebangsaan Indonesia.” *DIALEKTIKA* 13, no. 1 (30 Juni 2020): 96–110. <https://doi.org/10.33477/dj.v13i1.1362>.

Rahmi, Syamsul. “MODERNISASI PESANTREN (Studi Peran KH. Idham Chalid di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Tahun 1945-1966 M).” *AL-RISALAH* 14, no. 1 (30 Juni 2018): 1–28. <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/38>.

Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.